

Tingkat Kepatuhan Wajib Laporn LHKPN LHKASN Kecamatan Sawah Besar



Keterangan : 8 Wajib lapor LHKPN, 1 Wajib Laporn LHKASN LHKPN :

1. Camat
2. Wakil Camat
3. Sekretaris Kecamatan
4. Kasi Pemerintahan
5. Kasi Kesejahteraan Rakyat
6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7. Kasubbag Program dan Anggaran
8. Kasubbag Keuangan

LHKASN
Bendahara Pengeluaran



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANDRE RAVNIC
2. Jabatan : WAKIL CAMAT
3. NHK : 235130

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	348.000.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA ALTIS V / SEDAN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 228.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	50.250.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	100.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	498.250.000
III. HUTANG	Rp.	15.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	483.250.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHYU PRIASTANTO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
3. NHK : 823819

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 203.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
180.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 25.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 640.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 640.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARI SONJAYA**
2. Jabatan : **CAMAT**
3. NHK : **228517**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.180.100.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.180.100.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 188.500.000

1. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
135.500.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
15.500.000
3. MOTOR, YAMAHA XMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
37.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 395.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.596.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.359.900.000

III. HUTANG Rp. 100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.259.900.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : SUSILO JALAD ANGKOSO
NIK : 3171070505760006
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
Unit Kerja : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Sub Unit Kerja : KANTOR KECAMATAN SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 10 Maret 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : HERLINA
NIK : 3603125003700012
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
Unit Kerja : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Sub Unit Kerja : KANTOR KECAMATAN SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 7 Maret 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : DEDI SANTOSA
NIK : 3275010406730021
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
Unit Kerja : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Sub Unit Kerja : KANTOR KECAMATAN SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT
Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
Jenis Laporan : Periodeik - 2025
Tanggal Kirim : 9 Maret 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : FLORENT
NIK : 3175105403790001
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
Unit Kerja : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Sub Unit Kerja : KANTOR KECAMATAN SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 21 Februari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ABDUL SALAM

NIK : 3171023012680004

Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Unit Kerja : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sub Unit Kerja : KANTOR KECAMATAN SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Jenis Laporan : Periodik - 2025

Tanggal Kirim : 18 Maret 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ANNISA NUR ROCHMI
NIK : 3171064206850006
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
Unit Kerja : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Sub Unit Kerja : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Jabatan : BENDAHARA
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 3 Maret 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.